

**ANALISIS PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT MELALUI FESTIVAL PACU JALUR
DITEPIAN NAROSA TELUK KUANTAN
TAHUN 2024**

SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu
Program Studi Administrasi Negara*



**OLEH:
SILVIA ARIANI
NPM. 210411009**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI FESTIVAL PACU JALUR DITEPIAN NAROSA TELUK KUANTAN TAHUN 2024”** yang dibuat untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi adalah karya sendiri dan bukan merupakan hasil tiruan atau duplikasi dari skripsi yang pernah dipergunakan untuk mendapat gelar keserjanaan di lingkungan Universita Islam Kuantan Singingi maupun perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian informasinya yang dikutip dalam berbagai sumber sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan 20 April 2025
Yang membuat pernyataan



[Signature]
SILVIA ARIANI
NPM 210411009

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : ANALISIS PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN EREKONOMIAN
MASYARAKAT MELALUI FESTIVAL PACU JALUR DI
TEPIAN NAROSA TELUK KUANTAN TAHUN 2024

NAMA : SILVIA ARIANI

NPM : 210411009

UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS : ILMU SOSIAL

JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

PEMBIMBING II



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

TANDA PENGESAHAN

Diperiksa dan Disahkan Oleh Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 10
Bulan : Juli
Tahun : 2025

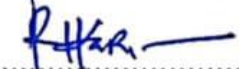
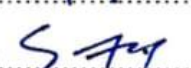
TIM PENGUJI

Ketua

DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302

Sekretaris

EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

1. **RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si** (Anggota 1) (.....)
2. **SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si** (Anggota 2) (.....)
3. **SARJAN M, S.Sos., M.Si** (Anggota 3) (.....)

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Dekan,

RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402



ABSTRAK

ANALISIS PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI FESTIVAL PACU JALUR DI TEPIAN NAROSA TELUK KUANTAN TAHUN 2024

Oleh:

SILVIA ARIANI

NPM: 210411009

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pelaksanaan Festival Pacu Jalur di Tepian Narosa, Teluk Kuantan, tahun 2024. Pacu Jalur, sebagai warisan budaya tradisional, tidak hanya menjadi daya tarik wisata tetapi juga memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian ini menggunakan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif). Pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pelaku usaha lokal, serta masyarakat setempat, untuk memahami strategi yang diterapkan dan dampaknya terhadap komunitas lokal. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menganalisis data ekonomi, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, jumlah kunjungan wisatawan, dan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah selama pelaksanaan festival. Festival ini memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Peran dinas dalam memfasilitasi, mengelola pariwisata, mendorong penanaman modal, serta menyediakan infrastruktur terbukti efektif dalam mendukung keberlangsungan festival dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Perekonomian

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE CULTURAL AND TOURISM SERVICE IN IMPROVING THE COMMUNITY'S ECONOMY THROUGH THE PACU JALUR FESTIVAL ON THE BANKS OF NAROSA BAY, KUANTAN IN 2024

By:

SILVIA ARIANI

NPM: 210411009

This study aims to analyze the role of the Department of Culture and Tourism in improving the community economy through the implementation of the Pacu Jalur Festival at Tepian Narosa, Teluk Kuantan, in 2024. Pacu Jalur, as a traditional cultural heritage, not only serves as a tourism attraction but also holds great potential to support local economic growth. This research employs a mixed- method approach (qualitative and quantitative). The qualitative approach is conducted through in-depth interviews with stakeholders, including the Department of Culture and Tourism, local business actors, and the local community, to understand the strategies implemented and their impact on the community. The quantitative approach involves analyzing economic data, such as the increase in community income, the number of tourist visits, and the contribution of the tourism sector to regional income during the festival. The festival has shown a significant impact on various economic, social, and cultural aspects of the local community. The department's role in facilitating, managing tourism, encouraging investment, and providing infrastructure has proven effective in supporting the sustainability of the festival and enhancing community welfare.

Keywords: Role of government, Economy

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2. Manfaat Praktis	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1. Tinjauan Pustaka.....	7
2.1.1. Teori Ilmu Administrasi Negara.....	7
2.1.2. Teori Kebijakan	11
2.1.3. Teori Peran Pemerintah	16
2.1.4. Teori Ekonomi Kreatif	18
2.1.5. Teori Festival Pacu Jalur	21
2.1.6. Teori Pendekatan Pentahelix	23
2.2. Kerangka Pemikiran	27
2.3. Hipotesis	27
2.4. Definisi Operasional	28
2.4.1. Memfasilitasi	28
2.4.2. Mendorong Penanaman Modal.....	28
2.4.3. Mengelola Pariwisata	29
2.4.4. Menyediakan Infrastruktur	29
2.4.5. Mengatur dan Mempromosikan.....	29
2.5. Operasional Variabel	30

BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Jenis Penelitian	32
3.2. Informan, Populasi dan Sampel.....	33
3.2.1. Informan	33
3.2.2. Populasi	34
3.2.3. Sampel	35
3.3. Sumber Data	36
3.3.1. Data Primer.....	36
3.3.2. Data Sekunder	36
3.4. Fokus Penelitian.....	36
3.5. Lokasi Penelitian	37
3.6. Metode Pengumpulan Data.....	37
3.6.1. Kuesioner	37
3.6.2. Wawancara	37
3.6.3. Observasi	37
3.7. Metode Analisis Data	38
3.8. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	40
BAB VI PENUTUP	41
6.1. Kesimpulan.....	41
6.2. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki daya tarik pariwisata yang tinggi. Letak geografis Indonesia yang mendukung keindahan alamnya serta banyaknya kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia inilah yang banyak menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Kepariwisataan merupakan seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai bentuk kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, dan pengusaha. Indonesia banyak memiliki keunikan seni budaya, banyak corak dan ragamnya yang menjadi ciri khas disetiap daerah tersebut. Dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan pariwisata untuk masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual masyarakat.

Sektor pariwisata dalam era globalisasi saat ini, telah menjadi salah satu industri terbesar dan terkuat di dunia, dimana pariwisata merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pemasok pendapatan negara serta pendorong perekonomian masyarakat. Secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang dilakukan dari suatu tempat ketempat lain dan dengan suatu perencanaan dengan tujuan semata-mata

untuk menikmati kegiatan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Potensi ini dapat dilihat pada festival pacu jalur yang dilaksanakan setiap tahun di Batang Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Festival ini telah menjadi tradisi tahunan yang menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata Riau bahwa pacu jalur merupakan tradisi yang sarat akan nilai sejarah. Jalur dalam bahasa daerah Kuansing diartikan sebagai sampan atau perahu yang panjang. Kegiatan festival pacu jalur juga disebut sebagai suatu pesta rakyat Kabupaten Kuantan Singingi. Festival pacu jalur telah menjadi bagian penting dari banyaknya budaya dan tradisi di daerah Indonesia.

Tabel I.1 Data Pelaku UMKM

NO	Pelaku UMKM	Jumlah Pedagang	Omzet/hari
1.	Pelaku UMKM EKRAF binaan Pemkab, BAZNAZ dan OK OCE	759	± 2 Juta

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi

Festival Pacu Jalur di Tepian Narosa, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, merupakan salah satu tradisi budaya tahunan yang telah mengakar kuat dalam masyarakat setempat. Diselenggarakan setiap tahun di Sungai Kuantan, festival ini melibatkan lomba perahu tradisional atau "jalur," yang telah menjadi simbol persatuan dan kekayaan budaya masyarakat Kuantan Singingi. Lebih dari sekadar acara olahraga, festival ini menjadi magnet wisata yang menarik ribuan pengunjung baik dari dalam maupun luar daerah.

Namun, meskipun memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian lokal, event ini sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya dukungan dan koordinasi dari pemerintah setempat. Tanpa

bantuan yang memadai, event-event ini mungkin kesulitan dalam hal perizinan, infrastruktur, promosi, dan keamanan, yang semuanya berdampak langsung pada potensi ekonomi yang bisa dihasilkan. Referensi dapat mencakup studi tentang pengaruh event pacu jalur terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, analisis peran pemerintah dalam mendukung industri pariwisata dan budaya, serta riset tentang strategi efektif untuk meningkatkan dampak positif dari event-event budaya seperti pacu jalur. Topik ini relevan dalam industri saat ini karena dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap warisan budaya dan pariwisata lokal, event pacu jalur memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal.

Tanpa peran pemerintah yang kuat dan strategi yang terkoordinasi dengan baik, potensi ini mungkin tidak tercapai sepenuhnya. Perlu kebijakan politik kebudayaan agar pelaksanaannya lebih baik. Sebab, sebuah event dalam kacamata pariwisata memiliki dampak sosial ekonomi. Selain menjadi ajang melestarikan budaya lokal, Festival Pacu Jalur juga memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Kehadiran wisatawan selama penyelenggaraan festival memberikan dampak positif bagi perekonomian warga, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Terdapat peningkatan pendapatan masyarakat melalui berbagai peluang usaha yang tumbuh, seperti penyediaan akomodasi, cinderamata, kuliner, dan berbagai jasa pendukung lainnya.

Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam mendukung festival ini agar lebih berdampak bagi perekonomian masyarakat. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyelenggara, tetapi juga sebagai fasilitator dalam

menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Langkah-langkah seperti peningkatan infrastruktur pendukung, promosi festival ke skala nasional dan internasional, serta pembinaan UMKM di sekitar area festival menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat lokal dapat merasakan dampak ekonomi secara langsung. Selain itu, pariwisata juga mendorong pertumbuhan sektor-sektor terkait seperti transportasi, makanan dan minuman, kerajinan, dan lain-lain. Dengan pengelolaan yang baik, pariwisata dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi yang kuat bagi Indonesia, memperkuat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Namun fakta dilapangan event pacu jalur tidak sepenuhnya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh masyarakat lokal. Pada hakikatnya sebagian besar masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi hanya datang untuk menyaksikan pacu jalur ini. Banyak masyarakat lokal yang tidak memanfaatkan festival pacu jalur tersebut sehingga menimbulkan atau mengakibatkan datangnya pedagang yang berdomilisi diluar daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan tujuan meningkatkan penghasilan pada event pacu jalur berlangsung. Lebih banyak masyarakat luar yang berwirausaha dibandingkan masyarakat lokal, jiwa kewirausahaan masyarakat lokal kurang sehingga lebih ingin memenuhi kebutuhan kultural (kebudayaan) dibandingkan meningkatkan perekonomiannya. Belum ada kajian komprehensif mengenai sejauh mana implementasi Festival Pacu Jalur dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dan dampak penyelenggaraan

Festival Pacu Jalur terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

Dengan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana event pacu jalur ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena kawasan arena pacu jalur menjadi salah satu ikon Kota Teluk Kuantan yang selalu dikunjungi oleh masyarakat, selain itu dengan adanya event pacu jalur menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar dan menjadi peluang usaha bagi masyarakat lokal dengan cara berdagang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan dan mengelola festival budaya sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Maka dari itu penulis membuat proposal yang berjudul **“Analisis Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Festival Pacu Jalur Di Tepian Narosa Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan pokok permasalahannya dalam penelitian ini sebagai berikut: bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan event pacu jalur sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Tepian Narosa Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan event pacu jalur sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Untuk memberikan informasi strategi dan peran upaya apa yang dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui festival pacu jalur.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Pengembangan Ilmu Administrasi Publik. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori tentang peran pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi berbasis budaya lokal. Hal ini akan memberikan wawasan tambahan mengenai bagaimana sektor publik dapat mendukung ekonomi masyarakat melalui pariwisata dan festival budaya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan efektivitas festival Pacu Jalur sebagai alat untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat menyusun strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Teori Ilmu Administrasi Negara

Secara konseptual administrasi merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha kelompok. Sebagai suatu konsep, administrasi adalah Universal Application. Administrasi ada bersamaan dengan munculnya umat manusia dan akan terus dipakai selama umat manusia itu masih hidup. Administrasi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam setiap usaha kelompok dan menandai setiap usaha pencapaian tujuan secara kolektif. Sekalipun administrasi itu berbeda bentuknya, sesuai dengan sifat usahanya, namun secara substantial ia adalah sama.

Unsur-unsur administrasi pasti ada, sekalipun ia berada di masyarakat primitive. Ia akan bertambah canggih Bersama dengan bertambah maju dan kompleksnya masyarakat. Administrasi muncul karena kebutuhan manusia untuk bekerja sama. Manusia menyadari akan nilai kerja sama dari suatu kenyataan bahwa hanya dengan melalui kegiatan kolektif lah ia dapat memperoleh sesuatu yang tak dapat ia capai seorang diri.

Kerjasama menurut adanya pembagian kerja di antara anggotanya. Pembagian kerja ini diperlukan karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, seperti ketidakmampuan individu untuk berada di dua tempat ada waktu yang bersamaan, ketidakmampuan untuk menguasai berbagai macam pengetahuan dan skill, serta ketidakmampuan untuk mengerjakan atau

menyelesaikan tugas-tugas secara sempurna. Kesemuanya itu disebabkan oleh perbedaan skill, sifat, dan kapasitas individu.

Kemajuan teknologi telah memaksa secara imperative diadakannya pembagian kerja dan secara substantial telah meredusir pentingnya kemampuan individual di dalam organisasi. Metode pembagian kerja antar anggota ini didasarkan atas perbedaan kemampuannya yang disebabkan oleh factor keturunan dan factor lingkungan. Hasilnya adalah penggunaan kemampuan yang sangat efisien serta akan mengarah kepada spesialisasi keahlian.

Administrasi merupakan alat dan bukan merupakan tujuan. Dengan demikian, maka tujuan akhir administrasi tidak berbeda dengan tujuan akhir organisasi. Administrasi diciptakan untuk melayani organisasi dan keberadaannya tidak untuk keperluan lain. Agar dapat mencapai tujuan organisasi dengan baik, administrasi dituntut untuk menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka menengah.

Ini meliputi keteraturan aktivitas yang dilaksanakan, penyedia dan penggunaan sumber manusiawi dan material secara kebijaksana, pengurangan pemborosan dan inefisiensi, ekonomis di dalam operasi, kesejahteraan pegawai, kepuasan pelanggan, pemecahan masalah secara cepat dan lainlain. Tidak ada organisasi yang sukses dalam mencapai tujuannya tanpa dukungan administrasi yang efektif.

Dalam konteks yang agak luas, pencapaian tujuan ekonomi, sosial, politik, militer atau keagamaan dari suatu organisasi sangat tergantung pada administrasi yang efisien. Usaha kelompok bertanggung jawab untuk memajukan masyarakat

dan sebaliknya kemajuan masyarakat ditunjang oleh administrasi yang berkelanjutan dan tertib. Administrasi yang efisien secara nyata memberikan andil yang sangat besar bagi suksesnya suatu organisasi dan akhirnya akan mengarah pada kemakmuran masyarakat. (Ekowanti dan Tamrin, 2022:7-8).

Administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara untuk menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara (*public administration consist...all those operations having for the purpose the fulfilment and enforcement of public policy*) lebih lanjut, Atmosudirdjo melihat administrasi negara pada fungsinya yang lebih luas lagi, yaitu melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (*strategy policy*) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata (implementasi dan menyelenggarakan undang-undang menurut pasal-pasal nya sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan).

Untuk memperjelas makna administrasi negara tersebut, Atmosudirdjo memerincinya dalam beberapa pengertian administrasi negara yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagai berikut: Pertama, sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau sebagai institusi politik (kenegaraan). Kedua, administrasi negara sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yaitu sebagai kegiatan pemerintah operasional. Ketiga, administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.

Dari pengertian tersebut sesungguhnya pemaparan mengenai administrasi negara dapat dilihat dalam dua segi, yaitu: Pertama, administrasi negara sebagai organisasi dan kedua, administrasi yang secara khas mengejar tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan atau publik yang artinya tujuan-tujuan yang ditetapkan

undang-undang secara *dwigend recht* (hukum yang memaksa). (Agus Hiplunudin, 2021:22).

Administrasi negara merupakan sebuah sistem yang dipakai suatu negara guna membantu pemerintahan dalam melengkapi keperluan masyarakat. Pada kehidupan modern seperti saat ini, negara lebih mengarah untuk berusaha memenuhi keperluan masyarakat, terutama dalam permasalahan pelayanan kesejahteraan rakyat, maka dibutuhkan adanya administrasi negara untuk melaksanakan tugas – tugasnya tersebut.

Dalam dunia administrasi, unsur-unsur kunci yang sering diangkat oleh para ahli meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Perencanaan berperan sebagai landasan dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, sementara pengorganisasian memastikan bahwa sumber daya dan struktur organisasi disusun dengan efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Pengarahan melibatkan pemberian instruksi, motivasi, dan bimbingan kepada karyawan agar dapat bekerja secara optimal. Pengawasan memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan melakukan koreksi jika terdapat penyimpangan. Sementara itu, pengambilan keputusan menjadi inti dari setiap tahapan administrasi, di mana keputusan strategis diambil berdasarkan analisis mendalam untuk memastikan efektivitas dan efisiensi organisasi. Secara keseluruhan, kelima unsur ini bekerja secara sinergis untuk memastikan operasional organisasi berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. (Sahya, 2016:1).

Menurut Suwarno (dalam Afifudin, 2015:3) Administrasi dalam arti sempit, yaitu berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik dan pencatatan secara tertulis untuk didokumentasikan, agar mudah menemukannya bila diperlukan lagi, baik secara terpisah, maupun tidak terpisah, dan segala sesuatu yang bersifat teknis, ketatausahaan (*clerial work*) jadi pengertian administrasi sebagai ketatausahaan (*clerial work*) merupakan sebagian kecil dari administrasi.

Menurut Atmosudirjo (dalam ngusmanto, 2015:15) administrasi adalah sesuatu yang terdapat dalam sesuatu organisasi tersebut, sehingga organisasi itu tidak dapat berkembang. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Suminta (dalam Pasolong, 2016:3) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi apapun bentuk organisasinya baik organisasi publik maupun organisasi bisnis.

2.1.2. Teori Kebijakan

Kebijakan Publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikta publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak.

Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik di negara modern adalah pelayanan publik, yaitu segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. (Engkus, 2022:6).

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakukan oleh para actor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. (Herdiana, 2018:3).

Dari berbagai kepustakaan, dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Nugroho R. (Uddin, 2017:8).

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik. Jadi, kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Tidak hanya sekedar hukum, tetapi kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang.

Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah

atau Peraturan Presiden, termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Dengan demikian, kebijakan publik sangat berkait dengan administrasi negara ketika publik actor mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Untuk itu, diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan “administrasi negara”. Terkait dengan kebijakan publik, menurut Thomas R. Dye penulis buku *Understanding Public Policy*, yang dikutip oleh Riant Nugroho D. adalah sarana untuk mencapai tujuan atau sebagai program yang di proyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik. Nugroho (Uddin, 2017:9).

Menurut Said Zainal Abidin, alumni *University of Pittsburgh*, Pennsylvania, US, kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya. Said Zainal Abidin (Uddin, 2017:10).

Menurut Nugroho dalam buku *Kebijakan Publik* (Uddin, 2017:10) Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yaitu: pertama, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan); kedua, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan; dan ketiga; bagaimana kebijakan publik tersebut di evaluasi.

Akan tetapi, dari semua isu tersebut di atas menurut Said Zainal Abidin dalam buku *Kebijakan Publik* (Uddin 2017:10), tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu diantara berbagai kebijakan:

- (1) Efektifitas, mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasikan tujuan akhir yang diinginkan.
- (2) Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
- (3) Cukup, suatu kebijakan dapat mencari hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada.
- (4) Adil
- (5) Terjawab, kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

Adapun beberapa pengertian kebijakan publik menurut para ahli yang dikutip dalam buku *Kebijakan Publik* (Uddin, 2017:34-35) diantaranya:

- (1) Irfan Islamy

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

(2) Thomas R. Dye

Kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak untuk dilakukan.

(3) George C. Edwards III & Ira Sharkansky

Kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah.

(4) W.I. Jenkins

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling terkait yang ditetapkan oleh seseorang actor politik atau sekelompok actor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada dasarnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor.

(5) James E. Anderson

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

(6) Chief J.O. Udoji

Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang memiliki sanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

2.1.3. Teori Peran Pemerintah

Menurut Poerwadarminta, (Cahya, 2017:22) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pada suatu kondisi atau peristiwa tertentu, dimana perilaku yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindakan yang memang diharapkan dilakukan oleh individu yang berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu pada tatanan masyarakat. Pemerintah merupakan unsur negara yang berperan penting dan bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan suatu negara. Pemerintah sebagai regulator memiliki peran untuk memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Maka dari itu diperlukannya pemberdayaan masyarakat guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang optimal dan merata.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2014 perubahan ketiga atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menegaskan bahwa pemerintah daerah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana pembaruan. Peran merupakan seperangkat perilaku yang seharusnya dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan pemerintah adalah salah satu elemen negara yang berperan penting dan bertanggung jawab dalam mengatur roda pemerintahan untuk mencapai tujuan suatu Negara.

Menurut Soerjono Soekanto (Ismail, 2017:9) dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara dan bagian-bagiannya. Pemerintah juga diartikan sebagai kelompok orang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.

Menurut arif (Muhardi, dkk, 2014:69) Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu:

1) Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah member acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrument untuk mengatur setiap kegiatan.

2) Pemerintah sebagai dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator yaitu mengerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.

3) Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjambatani kepentingan berbagai pihak dalam sosial seperti memiliki kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.

4) Pemerintah sebagai katalisator

Pemerintah sebagai katalisator yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat penembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

Peran pemerintah dituntut untuk mampu bertindak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian halnya dalam konteks pemerintahan daerah yang otonom, partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah akan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam segala bidang kehidupan. Salah satu yang menjadi ciri peran pemerintah yang kuat adalah dengan melihat seberapa besar fungsi dan kewenangan yang dimiliki, Apakah pelaksanaan pembangunan tersebut bersifat positif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan derajat otonom yang tinggi tanpa adanya intervensi dari kelompok kepentingan manapun.

2.1.4. Teori Ekonomi Kreatif

Teori Ekonomi kreatif berfokus pada pemanfaatan kreativitas dan inovasi sebagai aset ekonomi. Festival Pacu Jalur yang melibatkan budaya lokal dapat dianggap sebagai bagian dari ekonomi kreatif, karena mendorong pengembangan pariwisata budaya. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dan

pendukung finansial, serta bekerja sama dengan pelaku kreatif dan komunitas budaya untuk menciptakan daya tarik unik yang mendatangkan wisatawan. Teori ekonomi kreatif atau *creative economy* adalah konsep yang berkembang di dunia ekonomi modern.

Konsep ini berfokus pada peningkatan kualitas dan keberhasilan ekonomi melalui budaya dan industri kreatif. Istilah “ekonomi kreatif” pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli ekonomi Inggris, John Howkins, pada tahun 2001. Dia mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai “proses kreatif yang menghasilkan nilai ekonomi”. Ekonomi kreatif mencakup berbagai sektor industri, seperti seni pertunjukan, film, televisi, desain, periklanan, penerbitan, musik, dan teknologi informasi. Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi baru dimana ide, gagasan, kreatif dan inovasi sebagai modal utamanya dalam menggerakkan perekonomian tersebut (Purnomo, 2016:10).

Ekonomi kreatif merupakan gelombang ekonomi keempat, setelah ekonomi agraris, ekonomi industri dan ekonomi informasi (Sutanto, 2014:38). Kegiatan mengaplikasikan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh individu, kelompok atau perusahaan dengan modal kreatifitas, inovasi dan informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan disebut dengan industri kreatif

Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori

yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo.

Teori ekonomi kreatif menekankan pentingnya inovasi, kreativitas, dan keunikan dalam membangun keunggulan kompetitif. Dalam konteks ini, inovasi dan kreativitas tidak hanya meliputi produk dan layanan baru, tetapi juga proses produksi yang berbeda, model bisnis yang unik, serta pemasaran dan distribusi yang inovatif. Dalam teori ini, inovasi dan kreativitas menjadi faktor utama dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dikalangan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi yang berkembang berdasarkan pada aset kreatif yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sektor industri rumahan (UMKM) baik yang dilakukan oleh individu maupun BUM Desa cukup banyak yang telah berhasil di bidang ekonomi kreatif. (Hasan, 2018:82). Dalam pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan ekonomi kreatif, perlu menggali dan mengasah potensi creativity, innovation, invention dalam diri masyarakat. Secara umum ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Dalam paradigma ekonomi kreatif, pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas yang ada dalam diri masyarakat (Purnomo, 2016:11). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bidang ekonomi

kreatif merupakan salah satu pilihan terbaik dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

2.1.5. Teori/Konsep Festival Pacu Jalur

Pacu Jalur adalah sejenis lomba dayung tradisional yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Perlombaan mendayung ini menggunakan perahu dari kayu gelondongan, alias kayu utuh tanpa sambungan. Oleh masyarakat Riau, perahu tersebut dikenal dengan nama "*jalur*"

Pacu Jalur merupakan tradisi budaya turun-temurun yang diwariskan lebih dari 100 tahun oleh nenek moyang masyarakat Kuansing. Pada abad ke-17, jalur hanya digunakan sebagai alat transportasi bagi masyarakat yang tinggal sepanjang aliran Sungai Kuantan. Seiring berjalannya waktu, jalur-jalur yang digunakan sebagai alat transportasi tersebut semakin berkembang. Baik itu muncul jalur yang dihias dengan ukiran indah dan khas, dilengkapi payu, selendang, tiang tengah (gulang-gulang), serta lambai-lambai (tempat khusus bagi juru mudi berdiri). Perkembangan tersebutlah yang akhirnya "melahirkan" lomba adu cepat antar jalur, atau saat ini dikenal sebagai nama Festival Pacu Jalur. Awalnya, Pacu Jalur diselenggarakan untuk merayakan hari raya agama Islam, seperti Hari Raya Idulfitri di Riau. Namun, di masa penjajahan Belanda, Pacu Jalur digunakan untuk merayakan hari jadi Ratu Wilhelmina setiap tanggal 31 Agustus.

Pacu jalur adalah ekspresi budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kuantan. Sebelum pelaksanaan pacu jalur diadakan, maka ditetapkanlah panitia pelaksanaannya. Panitia pelaksana harus menjamin terlaksananya pacu dengan baik.

Biasanya panitia pelaksana selalu diprakarsai oleh camat bersama pemuka masyarakat (Hajrin, 2021:273).

Pacu jalur hanya dilakukan oleh para laki-laki yang berusia antara 15- 40 tahun. Setiap regu jumlah anggotanya antara 40-60 orang (bergantung dari ukuran jalur). Anggota jalur disebut anak pacu, terdiri atas: tukang kayu, tukang concang (komandan, pemberi aba- aba), tukang pinggang (juru mudi), tukang onjai (pemberi irama di bagian kemudi dengan cara menggoyang- goyangkan badan) dan tukang tari yang membantu tukang onjai memberi tekanan yang seimbang agar jalur berjungkat-jungkit secara teratur dan berirama.

Peraturan dalam pacu jalur tersebut dipimpin oleh juri atau wasit haruslah diketahui oleh peserta, peraturan inilah yang mengikat anak pacu di gelanggang atau di arena pacu jalur, sehingga tidak terjadi keributan karena tabrakan atau sesuatu yang memicu keributan karena tidak adanya aturan salah satunya siapa yang mengambil jalan lawan walaupun jalur sampai di finis terlebih dahulu, jalur tersebut dianggap diskualifikasi. Regu jalur yang dapat mencapai garis finis terlebih dahulu dari regu lain, dinyatakan sebagai pemenangnya. Masyarakat Kuantan Singingi menyebut sungai sebagai kata batang dikarenakan sungai seperti batang kayu yang memiliki cabang-cabang atau anak sungai. Penduduk Kuantan Singingi mempunyai tradisi perlombaan yang sangat populer yaitu pacu jalur yang tidak hanya populer pada kalangan masyarakat melainkan juga pada tingkat provinsi bahkan nasional (Hasbullah, 2015:178). Hal ini juga terlihat antusias masyarakat Kuantan Singingi mengumpulkan uang untuk menonton festival pacu jalur secara

langsung sehingga hari festival sangat ditunggu-tunggu dan mampu mengobati keletihan yang dialami. (Silawati, 2014:237).

Peran Pemerintah dalam pariwisata diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Beberapa peran pemerintah dalam pariwisata adalah:

- 1) Memfasilitasi
- 2) Mendorong penanaman modal
- 3) Mengembangkan pariwisata
- 4) Mengelola pariwisata
- 5) Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan potensi pariwisata
- 6) Menyediakan infrastruktur
- 7) Memperluas berbagai bentuk fasilitas
- 8) Mengatur dan mempromosikan umum ke daerah lain maupun ke luar negeri

Menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata

2.1.6. Teori/Konsep Pendekatakan Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata

Pentahelix adalah sebuah model inovatif pengembangan dari model QuadrupleHelix yang menghubungkan Akademisi, praktisi/bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media untuk menciptakan ekosistem berdasarkan kreatifitas dan pengetahuan, dimana yang diharapkan dari konsep ini adalah sebuah solusi untuk pengembangan kreatifitas, inovasi dan teknologi pada industry kreatif. Pendekatan ini melibatkan lima elemen: pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku bisnis, dan media. Melalui kolaborasi ini, pemerintah daerah bisa mengajak berbagai pihak

untuk berperan aktif dalam promosi Pacu Jalur, meningkatkan profesionalisme layanan, menyediakan fasilitas yang memadai, dan menarik minat wisatawan lebih luas melalui strategi pemasaran yang terarah.

Pendekatan pentahelix dalam pembangunan pariwisata adalah sebuah model kolaborasi yang melibatkan lima elemen utama dalam ekosistem pariwisata untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Konsep ini diusulkan untuk meningkatkan efektivitas pengembangan pariwisata dengan memperhatikan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Pentahelix berasal dari kata "penta" yang berarti lima, dan "helix" yang menggambarkan struktur kolaboratif. Dalam konteks pariwisata, pentahelix mencakup lima elemen atau pemangku kepentingan utama yang berinteraksi.

1) Pemerintah

Berperan dalam perencanaan, pengaturan, dan pengawasan pengembangan pariwisata. Kebijakan pemerintah yang mendukung infrastruktur, regulasi, dan promosi pariwisata dengan menciptakan lingkungan yang kondusif.

2) Pengusaha (Bisnis)

Termasuk pelaku industri pariwisata seperti hotel, restoran, agen perjalanan, dan penyedia jasa lainnya. Sektor bisnis berkontribusi dalam penyediaan layanan, produk, dan inovasi untuk menarik wisatawan.

3) Masyarakat

Masyarakat lokal memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata, karena mereka adalah tuan rumah bagi wisatawan. Keterlibatan

masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelestarian budaya, dan promosi potensi lokal sangat krusial untuk keberhasilan pariwisata.

4) Akademisi

Institusi pendidikan dan peneliti berkontribusi melalui penelitian, pengembangan teknologi, dan penyediaan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pariwisata. Akademisi juga dapat memberikan analisis data dan wawasan tentang tren pariwisata.

5) Media

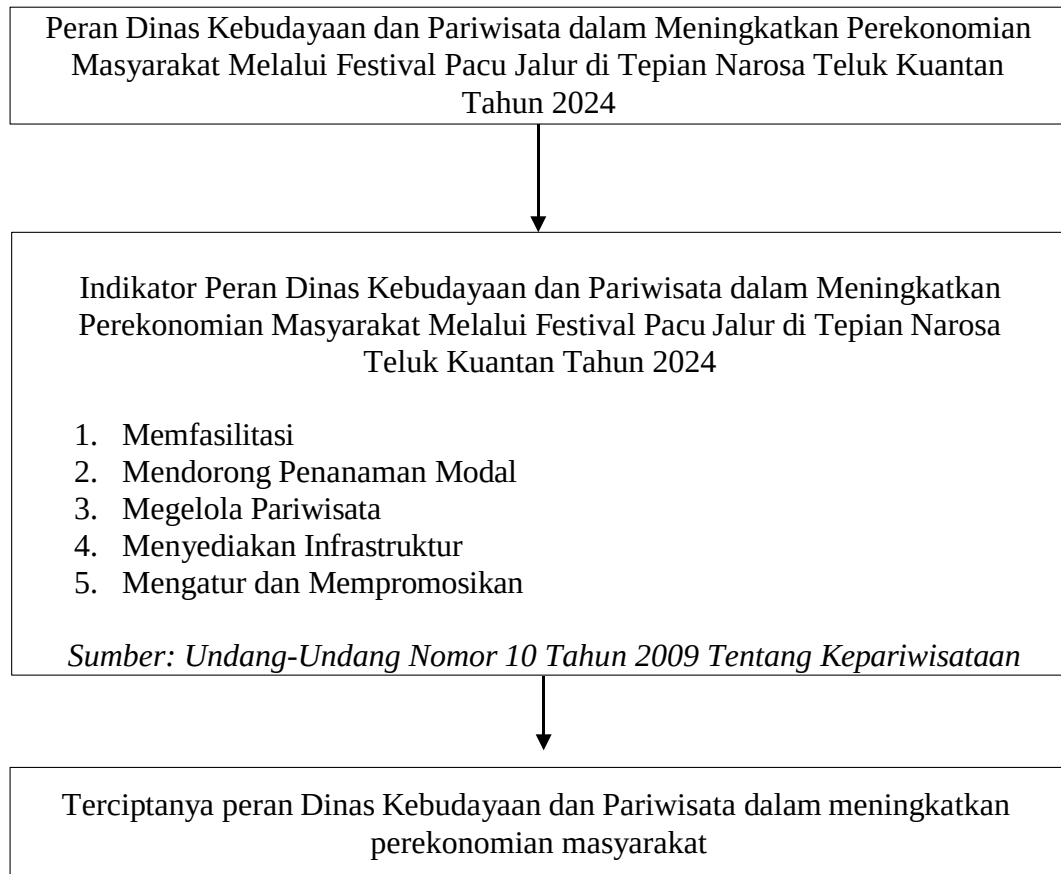
Media berfungsi sebagai alat untuk mempromosikan destinasi, memberikan informasi, dan membentuk persepsi publik tentang pariwisata. Media sosial dan platform digital juga memainkan peran penting dalam pemasaran pariwisata modern.

Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pendekatan ini menciptakan sinergi yang meningkatkan efektivitas pembangunan pariwisata. Pendekatan pentahelix dalam pembangunan pariwisata memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk meningkatkan kolaborasi dan memfasilitasi pembangunan yang berkelanjutan, serta memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki peran dan kontribusi yang berarti dalam pengembangan pariwisata. Unsur Penta Helix ini semula berupa Triple Helix dengan unsur-unsur *Academics*, *Business Sector*, *Government*, yang kemudian ditambahkan dengan satu unsur, *Civil Society* (atau *Communities* dalam penelitian ini), menjadi *Quadruple Helix*, untuk mengakomodasi perspektif masyarakat, dalam hal ini merupakan “masyarakat berbasis media dan budaya” yang juga telah menjadi

bagian menyeluruh dari inovasi di Abad-21 ini. Lebih jauh lagi, unsur *Communities* membuka peluang konfigurasi dan jejaring lintas disiplin, serta membebaskan konsep “inovasi” dari sekedar pertimbangan dan tujuan ekonomi, melainkan juga melibatkan kreativitas sebagai bagian dari proses produksi pengetahuan dan inovasi. (Muhyi dkk, 2017:417).

2.2. Kerangka Pemikiran

II. 1 Gambar Kerangka Pemikiran



2.3. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Sehingga dapat ditemukan suatu jawaban atau pendapat. Dugaan sementara yang penulis simpulkan berdasarkan observasi dalam penelitian ini adalah belum optimalnya peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitaran festival pacu jalur di Tepian Narosa Teluk Kuantan dan masyarakat yang ada di Kabupaten Kuantan

Singingi sehingga masih adanya masyarakat pendatang dari luar daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang datang untuk berdagang guna meningkatkan perekonomiannya.

2.4. Defenisi Operasional

Untuk mengukur terlaksana atau tidaknya peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti menggunakan beberapa indikator yang bersumber dari:

2.4.1 Memfasilitasi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan penting dalam memfasilitasi festival pacu jalur untuk membantu atau mendukung suatu kegiatan, diskusi, atau proses agar berlangsung lebih mudah, lancar, dan efektif. Dalam konteks pemerintahan atau organisasi, memfasilitasi berarti memberikan dukungan, baik berupa sarana, prasarana, regulasi, atau sumber daya lain, agar suatu kegiatan atau program dapat berjalan sesuai tujuan.

2.4.2 Mendorong Penanaman Modal

Mendorong penanaman modal ini dilakukan oleh pemerintah untuk menarik investasi, untuk meningkatkan aliran dana dan seperti insentif pajak, kemudahan perizinan, infrastruktur yang memadai sehingga dapat menggerakkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta memacu pertumbuhan ekonomi.

2.4.3 Mengelola Pariwisata

Mengelola pariwisata diperlukan dalam pelaksanaan Festival Pacu Jalur agar terlaksana sesuai prosedur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan Festival Pacu jalur sehingga terlaksana dengan baik.

2.4.4 Menyediakan Infrastruktur

Menyediakan infrastruktur ini dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada saat Festival pacu jalur. Infrastruktur ini memungkinkan masyarakat lokal dan para pengunjung untuk berinteraksi dengan nyaman, mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah. Seperti menyediakan area khusus untuk bazar atau stand UMKM, transportasi lokal, area parkir, fasilitas kebersihan, dan menyediakan fasilitas bagi media dan influencer untuk meliput acara agar bisa menarik lebih banyak pengunjung.

2.4.5 Mengatur dan Mempromosikan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan penting dalam mengatur dan mempromosikan festival pacu jalur. Dengan pengaturan yang baik dan strategi promosi yang efektif festival pacu jalur dapat menarik lebih banyak pengunjung, serta meningkatkan partisipasi komunitas, dan memberikan dampak positif pada perkembangan ekonomi.

2.5. Operasional Variabel

Tabel II.1 Operasional Variabel Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Item	Ukuran
Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Analisis peran dinas kebudayaan dan pariwisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui festival pacu jalur di Tepian Narosa Teluk Kuantan Tahun 2024	Memfasilitasi	1. Ketersediaan Infrastruktur 2. Kemudahan akses 3. Fasilitas kesehatan dan keamanan 4. Fasilitas kebersihan	Sangat Baik Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
		Mendorong penanaman modal	1. Investor yang terlibat 2. Dampak ekonomi dari investasi	Sangat Baik Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
		Mengelola Pariwisata	1. Ketersediaan pelayanan publik 2. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal	Sangat Baik Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
		Menyediakan infrastruktur	1. Kualitas infrastruktur 2. Ketersediaan Infrastruktur	Sangat Baik Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
		Mengatur dan Mempromosikan	1. Rencana kegiatan	Sangat Baik

			festival pacu jalur 2. Media promosi yang digunakan 3. Cakupan dan jangkauan promosi	Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
--	--	--	--	--

Sumber: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel dari populasi tersebut. (Sugiyono, 2017:7).

Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu variable atau lebih (variable yang berdiri sendiri atau variable bebas) tanpa membuat perbandingan variable itu sendiri. (Sugiyono, 2017:35).

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya,; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. (Sugiyono, 2017:8).

Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistic yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui festival pacu jalur di Tepian Narosa Teluk Kuantan Tahun 2024.

3.2 Informan, Populasi dan Sampel

3.2.1 Informan

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek suatu penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang tersebut sebagai narasumber.

Teknik penentuan sampling yang peneliti gunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel datanya adalah orang yang ahli mengenai makanan, atau penelitian tentang kondisi politi disuatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. (Sugiyono, 2017:96)

Dalam hal ini yang menjadi informan adalah pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 4 orang. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.1 Jumlah Informan

No	Unsur Informan	Key Informan
1	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1
2	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif	
3	Kepala Bidang Kebudayaan	
4	Kepala Bidang Destinasi	
5.	Kepala Dinas koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian	

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2024

3.2.2 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2012:119).

Populasi pedagang di kawasan tepian narosa Teluk Kuantan berjumlah 759 pedagang. Dikarenakan populasi yang banyak, untuk mempermudah dalam memperoleh presentase jawaban tersebut maka penulismenentukan jumlah sampel dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$\text{Rumus Slovin: } n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana n : Jumlah Sampel

N : Populasi

E : Persepsi akibat kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir
(15,% = 0,15)

Dan rumus slovin diatas, maka sampel dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{759}{1 + 759(0,15)^2}$$

$$n = \frac{759}{18,0775}$$

$$n = 41,98$$

$n = 41$ Responden (digenapkan)

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 41 pedagang. Jumlah responden tersebut dianggap sudah representatif untuk memperoleh data penulisan yang mencerminkan keadaan populasi

3.2.3 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karaktersistik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,12:119). Dalam hal ini yang dijadikan populasi adalah pedagang di kawasan tepian narosa Teluk Kuantan, pemilihan pedagang tersebut dikarenakan itulah lokasi dan tempat melaksanakan festival pacu jalur berlangsung.

Tabel III. 2 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No	Nama Responden	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Pedagang	759	41	5,4%
Jumlah		759	41	

Sumber : Modifikasi peneliti Tahun 2024

Jadi, jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 41 pedagang, dimana pengambilan sampel digunakan sampel *Random Sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang mana jumlah sampel untuk penelitian ini berjumlah 41 pedagang.

3.3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan. (V.Wiratna Sujarweni, 2018:3).

3.3.1. Data Primer

Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti ini juga melakukan survei dan wawancara dengan beberapa narasumber sesuai dengan keperluan penelitian. (Sugiyono, 2018:256).

3.3.2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan dari catatan, buku, majalah, jurnal, artikel, buku-buku teori, dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data. (V. Wiratna Surjarweni, 2018:6).

3.4. Fokus Penelitian

Tidak ada penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui festival pacu jalur di Tepian Narosa Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.

3.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana suatu penelitian itu dilakukan. Adapun lokasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Komplek Perkantoran di Kabupaten Kuantan Singingi dan kawasan Tepian Narosa Teluk Kuantan.

3.6. Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan para member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variable yang akan diukur dan tahu apa yang akan bisa diharapkan dari responden.

3.6.2 Wawancara

Wawancara (*interview*) menurut Esterberg dalam Sugiyono (2019), adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3.6.3 Observasi

Observasi merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang paling terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. (Sugiyono, 2019: 166).

3.7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sistensa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2020:131).

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan bahan masukan yang akan digunakan dalam pelaksanaan penulisan ini, Setelah data terkumpul tentunya diberikan penjabaran terhadap data tersebut dengan menggunakan prosentase. Untuk itu, dalam memberikan penganalisaan menggunakan teknik data kuantitatif yaitu data dijabarkan ke dalam bentuk angka-angka. Yang skor berdasarkan skala likert berikut ini:

SB = Sangat Baik diberi skor 5

B = Baik diberi skor 4

CB = Cukup Baik diberi skor 3

KB = Kurang Baik diberi skor 2

TB = Tidak Baik diberi skor 1

Keseluruhan sub indikator yang telah diajukan pada responden dicari persentase rata-rata kuantitatifnya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan: P = Persentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan analisis peran dinas kebudayaan dan dinas pariwisata dalam meningkatkan perekonomian di Tepian Narosa Teluk Kuantan Tahun 2024, hasil persentase rata-rata kualitatif diukur menggunakan interval yang distribusikan dalam bentuk persen. (Menurut Suharsimi Arikunto (2016:79) sebagai berikut:

Tinggi/Sesuai	: 76-100%
Cukup Sesuai/ Kurang	: 56-75%
Tidak Sesuai/ Rendah	: 40-55%
Sangat Tidak Sesuai/Sangat Rendah	: 0-39%

Setelah data terkumpul, penulis memisahkan dan melaporkan data tersebut menurut jenisnya dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Dalam penelitian inidata dianalisa secara deskriptif kuantitatif yaitu memberikan gambaran secara saksama lalu menarik kesimpulan dan pada akhirnya memberikan saran-saran.

3.8. Jadwal Kegiatan

Penelitian Tabel III.3 Jadwal

Kegiatan		Bulan dan Minggu dalam Tahun 2024-2025																							
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
No	Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal	x																							
2	Pembuatan Proposal			x																					
3	Bimbingan Proposal							x	x	x	x														
4	Seminar Proposal											x													
5	Revisi Proposal												x												
6	Pembuatan Skripsi													x	x	x	x								
7	Bimbingan Skripsi																	x	x	x	x	x			
8	Sidang Skripsi																							x	
9	Revisi Skripsi																								x

Sumber: Modifikasi Penelitian 2024

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui Festival Pacu Jalur di Tepian Narosa Teluk Kuantan tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa festival ini memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Peran dinas dalam memfasilitasi, mengelola pariwisata, mendorong penanaman modal, serta menyediakan infrastruktur terbukti efektif dalam mendukung keberlangsungan festival dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

6.2 Saran

6.2.1 Peningkatan Infrastruktur

1. Pemerintah daerah diharapkan untuk meningkatkan kualitas akses jalan, penginapan, serta fasilitas umum lainnya guna memberikan kenyamanan bagi wisatawan dan peserta festival.
2. Perlu adanya sistem transportasi yang lebih terintegrasi agar mobilitas pengunjung lebih mudah dan lancar.

6.2.2 Penguatan Promosi dan Kemitraan

1. Promosi Festival Pacu Jalur perlu diperluas dengan memanfaatkan media digital, media sosial, serta kolaborasi dengan influencer dan agen perjalanan.

2. Kemitraan dengan pihak swasta perlu terus diperkuat untuk mendukung pembiayaan dan penyelenggaraan festival.

6.2.3 Pemberdayaan Masyarakat dan UMKM

Pelaku UMKM lokal perlu mendapatkan pelatihan dan pembinaan agar produk yang mereka tawarkan semakin kompetitif dan menarik bagi wisatawan. Pemerintah daerah perlu menyediakan ruang usaha yang lebih tertata untuk UMKM selama festival berlangsung. Perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap penyelenggaraan Festival Pacu Jalur guna memperbaiki kekurangan dan mengoptimalkan peluang yang ada.

Inovasi dalam penyelenggaraan festival perlu terus dilakukan agar tetap menarik dan relevan bagi masyarakat serta wisatawan. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan Festival Pacu Jalur dapat semakin berkembang sebagai aset budaya dan pariwisata yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Teluk Kuantan dan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afifudin. 2015. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- Hiplunudin Agus. 2021. *Etika Administrasi Negara*. CV. Andi Offset: Yogyakarta
- Ngusmanto. 2015. *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Mitra Wacana Media: Jakarta
- Nurdin Ismail. 2017. *Etika Pemerintahan, Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books
- Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Purnomo, R. A. (2016). *Ekonomi kreatif pilar pembangunan Indonesia*. Ziyad Visi Media
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Alfabeta: Bandung
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Sujarweni, V. W. (2018). *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss
- Uddin, Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. CV SAH MEDIA: Makassar

Jurnal:

- Cahya. 2017. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Transformasi. Manajemen Pemerintahan. Vol.9 No.2.
- Ekowanti, M. R. L., & Tamrin, M. H. (2022). Pengantar ilmu administrasi negara.

- Engkus, H. (2022). *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi serta Perubahan)*.
- Hajrin, M., & Irwan, I. (2021). Tradisi “Pacu Jalur” di Teluk Kuantan dalam Berkarya Seni Grafis. *Serupa The Journal of Art Education*, 10(4), 272-281.
- Hasan, M. (2018). Pembinaan ekonomi kreatif dalam perspektif pendidikan ekonomi. *Jurnal ekonomi dan Pendidikan*, 1(1), 81-86.
- Hasbullah, H. (2015). Pacu Jalur dan Solidaritas Sosial Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi (Kajian terhadap Tradisi Maelo). *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 7(2), 177-193.
- Herdiana, D. 2018. Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik* 1(3): 17
- Muhyi, H. A., Chan, A., Sukoco, I., & Herawaty, T. (2017). The Penta Helix collaboration model in developing centers of flagship industry in Bandung city. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 6(1), 412-417.
- Sahya, A. 2016. Ilmu Administrasi Negara. In *CV. Pustaka Setia* (Vol. 53, Issue 9)
- Silawati, A. (2014). Mengungkap Nilai-nilai Magis pada Tradisi Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi. *Sosial Budaya*, 11(2), 237-250.
- Sutanto, M. H. (2014). Gelombang Ekonomi Ke Empat, Gelombang Ide dan Gagasan. *Komunikator*, 6(01).
- Windasai, W., Said, M. M. U., & Hayat, H. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan M

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.